



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 741163 Faksimile (0561) 764919  
Laman [www.satpolpp.kalbarprov.go.id](http://www.satpolpp.kalbarprov.go.id) . Pos-el [satpolpp@kalbarprov.go.id](mailto:satpolpp@kalbarprov.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 131 /SATPOLPP/2023

#### TENTANG

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan komitmen peningkatan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, perlu ditetapkan standar operasional prosedur penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);




6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020, Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 10 Agustus 2023  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Barat,

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	
Kasubbag Umpar	

  
Suherman



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 131 /SATPOLPP/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

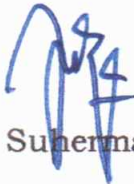
NO	JENIS SOP
A.	BAGIAN SEKRETARIAT
	SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR.
1.	Pengusulan Tugas Belajar/Izin Belajar
2.	Penerbitan Surat Keterangan Gaji Berkala Pegawai Gol.III.d kebawah
3.	Proses Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Gol.III.d keatas
4.	Penerbitan Surat Perintah Tugas
5.	Perbitan Surat Izin Cuti PNS
6.	Fasilitasi Penyediaan Narasumber
7.	Pelayanan Konsultasi
8.	Pengajuan Mutasi Keluar dari Pemprov Kalimantan Barat
9.	Pelayanan Tamu
10.	Pelayanan Usulan Taspen
11.	Pembinaan PNS
12.	Penanganan Rumah Tangga Kantor
13.	Penerbitan Pengajuan Angka Kredit
14.	Pengagendaan Surat
15.	Pengajuan Pensiun PNS
16.	Pengamanan Kantor
17.	Pengumpulan SKP
18.	Pengusulan Peserta Diklat
19.	Pengusulan Kenaikan Pangkat
20.	Pelayanan Pengusulan Perubahan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu
21.	Pengusulan Perubahan Status CPNS menjadi PNS
22.	Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS
23.	Pelayanan Penyewaan Tempat
24.	Permohonan Penyusunan DUK
25.	Persiapan Pelaksanaan Rapat
26.	Rekap Kehadiran Kerja
27.	Pengusulan Penghargaan SLKS
28.	Pengurusan Surat Keluar
29.	Penanganan Surat Masuk
30.	Pengusulan ASN Teladan
31.	Penerbitan SK Kepala Satuan Daerah
32.	Pengusulan Ujian Dinas
33.	Penghapusan Arsip
34.	Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional
35.	Permintaan Nomor Surat
	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
36.	Buku Kas Umum
37.	Pajak
38.	Pengeluaran Barang Inventaris
39.	Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
40.	Belanja GU
41.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
42.	Permintaan Gaji
43.	Pencairan Anggaran
44.	Pencairan Dana Kegiatan



45	Pengajuan SPM Gaji, Tunjangan PNS
46	Pengajuan Dana Uang Persediaan (UP)
47	Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris
48	Penerimaan Barang Inventaris
49	Pengadaan Pemeliharaan Barang
50	Pengajuan Dana Uang Persediaan
51	Penghapusan Barang Milik Daerah
52	Pengurusan Barang
53	Penyimpanan Barang
54	Penyusun Laporan Keuangan Akhir
55	Pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ)
56	Prosedur Penyampaian RKBMD
57	Pengajuan Usulan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
58	Pengajuan Permintaan Ganti Uang (GU)
	SUB BAGIAN RENJA DAN MONEV
59	Penyusunan Rencana Kerja
60	Penyusunan RKA dan DPA Penyempurnaan
61	Monitoring Evaluasi Kinerja Secara Periodik
62	Pengumpulan Data Kinerja
63	Perbaikan Data Kinerja
64	Penyusunan Laporan Kinerja Kasat
65	E-Kinerja
66	Penyusunan DPA Penyempurnaan
67	Persiapan Penyusunan Manajemen Resiko
68	Pelaksanaan dan Pelaporan Monev
69	Penyusunan DPA Murni
70	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
71	Penyusunan Revisi Kegiatan dan Anggaran
72	RKA Perubahan Anggaran
73	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
74	Penyusunan RKA
	BIDANG PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
75	Melakukan Tindakan Non Yustisi Serta Razia Terhadap PNS Pada Saat Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
76	Kegiatan Non Yustisi Razia Rokok
77	Razia Penegakkan Dan Penertiban Tempat Hiburan Malam
78	Kegiatan Razia Pajak Kendaraan Bermotor
79	Penyidikan Dan Penyelidikan
80	Operasi Penegakkan Perda Dan Perkada
	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
81	Sosialisasi Perda dan Perkada di Kabupaten/Kota
82	Pengumpulan Data Deteksi Dini
83	Pembinaan dan Penyuluhan
84	Rakor Penyelenggaraan Trantibum dan Linmas
	BAGIAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
85	Penjagaan Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah
86	Penjagaan Rumah Dinas Jabatan Pemerintahan Daerah
87	Penjagaan Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah
88	Penjagaan Tempat Kedatangan Dan Tujuan Tamu / Delegasi VIP Dan VVIP
89	Penjagaan Gedung Dan Asset Penting
90	Penjagaan Upacara Dan Acara Penting

	BAGIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
91	Kegiatan Monev, Pengendalian Dan Operasi Satuan Perlindungan Masyarakat
92	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Base Satuan Perlindungan Masyarakat
93	Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Satuan Perlindungan Masyarakat
94	Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pemeliharaan Tramtibmas Satuan Perlindungan Masyarakat
95	Pelaksanaan Kegiatan Inhouse Training Kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat
96	Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Barat,




Suherman



	BAGIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
91	Kegiatan Monev, Pengendalian Dan Operasi Satuan Perlindungan Masyarakat
92	Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Base Satuan Perlindungan Masyarakat
93	Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Satuan Perlindungan Masyarakat
94	Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pemeliharaan Tramtibmas Satuan Perlindungan Masyarakat
95	Pelaksanaan Kegiatan Inhouse Training Kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat
96	Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan Satuan Perlindungan Masyarakat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Barat,

PARAF HIRARKI	
Sekretaris	
Kasubbag Umpar	

Suherman